



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH  
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH**

**(Studi Kasus Kota Padang)**

**Oleh :**

**LUTHFI FUADI**

**05 951 031**

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2009**

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| No.Alumni Universitas   | Luthfi Fuadi | No.Alumni Fakultas |
| a). Tempat/Tgl lahir: Bukit Tinggi 09 Maret 1987 b). Nama Orang Tua: Zulfahri Nst dan Dartina c).Fakultas: Ekonomi d).Jurusan: Ilmu Ekonomi e).No.Bp:05 951 031 f).Tgl Lulus: 10 Juli 2009 g).Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h).IPK: 3, 20i).Lama Studi: Empat Tahun j).Alamat Orang Tua: Pasaman Baru, Pasaman Barat |              |                    |

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Padang)**

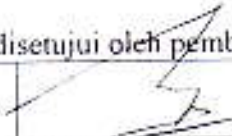
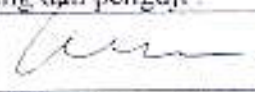
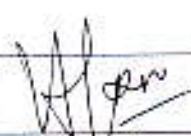
*Skripsi S1 Oleh: Luthfi Fuadi  
Pembimbing Drs.M,Nazer, MA*

*Abstrak:*


Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 secara efektif mulai melaksanakan otonomi daerah. Kota Padang adalah satu daerah yang ikut merasakan dampaknya. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Padang untuk lebih mandiri . Kemandirian ini dapat dilihat dari ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transfer atau DAU dari pemerintah pusat dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemerintah Kota Padang. pengujian dilakukan dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau sering disebut pangkat kuadrat terkecil biasa, dan dengan menggunakan "Double Log" hal ini dilakukan karena dependent variable dan independent variable yang digunakan berada dalam format natural logarithm atau log-linear karena hubungan linier pada logaritma dari semua variabel yang digunakan. Setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa baik secara serempak maupun secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| Tanda Tangan |  |  |  |
| Nama Terang  | Drs. M.Nazer, MA  | Dra. Laksmi Dewi, Msi   | Dr. Helizal Handra, M.Soc.Sc  |

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Prof Dr H.Firwan Tan SE.M.Ec.DEA.Ing  
NIP. 130812952

  
Tanda Tangan

|                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
|                        | Petugas Fakultas / Universitas Andalas |              |
| No. Alumni Fakultas:   | Nama                                   | Tanda Tangan |
|                        |  |              |
| No. Alumni Universitas | Nama                                   | Tanda Tangan |
|                        |  |              |



## Bab I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan - kepentingan nasional.

Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah dengan diselenggarakannya otonomi daerah. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan daerah di dalam memanfaatkan semua potensi daerah yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Menurut Syamsi daerah otonom harus mempunyai beberapa kemampuan agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya.

kemampuan itu antara lain kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan sebagainya (1994 : 221).

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. Salah satunya UU 5/1974 yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya di bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Kuncoro perbedaan antara otonomi daerah pada UU 5/1974 dengan UU 22/1999 adalah bahwa pada UU 5/1974 hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sedangkan UU 22/1999 otoda merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. menurut Kuncoro hal ini menerangkan bahwa UU lama menganut unsur kewajiban. UU baru, menekankan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankan pada pentingnya aspirasi masyarakat. namun UU baru tidak menyebutkan otonomi daerah sebagai hak (2004:22)

## Bab V

### Kesimpulan Dan Implikasi

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji t, variable Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis terbukti.

Untuk DAU berpengaruh positif, hal tersebut bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat akan menyebabkan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi transfer akan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Untuk PAD berpengaruh positif, menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit.

2. Untuk uji kebaikan model (uji F dan  $R^2$ ) menunjukkan bahwa model cukup bagus karena secara bersama-sama variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan besarnya nilai  $R^2$  sebesar 0.978 berarti 97,8% variasi variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan variasi dependen (Belanja Daerah)



## Daftar Pustaka

- Adi, Priyo Hari, 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. pada symposium akuntansi X Unhas Makassar 26 – 28 juli 2007
- Davey, Kenneth. 1988. *pembiayaan pemerintah daerah praktek – praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Dumairy. 1997. *perekonomian Indonesia*. Jakarta : erlangga
- Gujarati, Damodar. 1999. " EKONOMETRIKA DASAR " diterjemahkan Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat , 2004. "Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang". Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Haryo, 2007. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat*, The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia.
- Mangkoesoehroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, BPEF. Yogyakarta.
- Rochman. 2007. *analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah pada kabupaten / kota di propinsi jawa tengah*. skripsi pada jurusan ilmu ekonomi universitas islam indonesia yogyakarta